

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Amrah Muslimin. 1985. *Beberapa Asas Dan Pengertian Pokok Tentang Administrasi Dan Hukum Administrasi*. Bandung; Alumni Bandung.
- Aos Kuswandi, 2016, *Manajemen Pemerintahan Daerah*, Bekasi; Lembaga Penerbitan Pascasarjana Universitas Islam'45' (UNISMA).
- Bambang Sugianto dan Evi Oktarina. 2020, *Hukum Tata Negara*. Depok; PT Rajagrafindo Persada.
- Bambang Sugianto. 2022. *Hukum Pemerintahan Daerah* (Diktat). Palembang; Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda.
- Bambang Istanto. 2011. *Manajemen Pemerintahan dalam Perspektif Pelayanan Publik*. Jakarta; Mitra Wacana Media.
- Darmanto. 2017. *Teori dan Aplikasi Informasi*. Jakarta; PT Gramedia.
- Dhoho A. Sastro, et.al. 2010. *Mengenal Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik*. Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat.
- Gede Narayana, et.al. 2021. *Bunga Rampai Satu Dekade Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia*. Jakarta; Komisi Informasi Pusat RI.
- Hetifah Sj. Sumarto. 2009. *Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance*. Jakarta; Yayasan Obor Indonesia.
- Hinca IP Panjaitan dan Amir Effendi Siregar. 2004. *Menegakkan Kemerdekaan Pers "1001" alasan UU Pers Lex Specialis dalam Menyelesaikan Permasalahan akibat Pemberitaan Pers*. Jakarta; Serikat Penerbit Surat kabar.

- Ichlasul Amal dan Armaidly Armawi. 1999. *Keterbukaan Informasi dan Ketahanan Nasional*. Yogyakarta; Gadjah Mada University Press.
- Irwansyah. 2020. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta; Mirra Buana Media.
- Inu Kencana Syafii. 2007. *Manajemen Pemerintah*. Jakarta; PT. Perca.
- Jogiyanto. 2005. *Analisis & desain: sistem informasi: pendekatan terstruktur teori dan praktik aplikasi bisnis*. Yogyakarta; Andi Offset.
- Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia. *Rencana Strategis Komisi Informasi Pusat 2022-2026*. Jakarta.
- LAN dan BPKP. 2000. *Akuntabilitas dan Good Governance*. Jakarta; LAN.
- Mandica-Nur dan Edi Sutraja. 2009. *Panduan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Untuk Petugas Pengelola dan Pemberi Informasi di Badan Publik*. Jakarta, Indonesia Research and Development Institute (IRDI) dan Depkominfo.
- Munir. 2003. *Manajemen Informasi*. Jakarta; Penerbit ITB.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press.
- Ni Ketut Sari Andayani. 2018. *Hukum Pemerintahan Daerah dalam Perspektif Kajian Pengelolaan Potensi Lokal*. Depok; Rajawali Pers.
- N. Luhmann. 1995. *Social Systems*. Stanford; Stanford University Press.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta; Kencana Prenada Media Group.

Samodra Wibawa. 2012. *Mengelola negara: panduan untuk bupati, Gubernur dan presiden*. Yogyakarta; Gava Media.

Sirajudin, et.al. 2011. *Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi & Keterbukaan Informasi*. Malang; Setara Press.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung; Alfabeta.

Suprawoto. 2018. *Government Public Relations perkembangan dan Peraktik di Indonesia*. Jakarta; Prenadamedia Group.

JURNAL

Agus Irawan, 2018, Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa Dalam Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Dari Pemerintah Kabupaten/Kota Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, Jurnal Yuridis Unaja, Volume 1 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Adiwangsa Jambi. Jambi

Endang Retnowati. 2012. *Keterbukaan informasi publik dan good governance (antara das sein dan das sollen)*. Jurnal Perspektif. Volume 17 Nomor 1. Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Surabaya.

Nunuk Febriananingsih. 2012. *Keterbukaan Informasi Publik dalam Pemerintahan Terbuka Menuju Tata Pemerintahan yang Baik*. Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional. Volume 1

Nomor 1. Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta.

Ricky dan Muh.Tanzil Aziz Rahimallah. 2022. *Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia (Perspektif Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi)*. Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja. Volume 21 Nomor 2. Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan Kampus IPDN. Jatinangor.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Peraturan Komisi Informasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Metode dan Teknik Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik.

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Desa.

Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

MEDIA ONLINE

[Good Governance : Pengertian dan Prinsip-prinsipnya \(detik.com\)](https://www.detik.com) diakses pada Minggu, 9 Oktober 2022 Pukul 19.15 Wita

<https://www.atmago.com/berita-warga/hari-keterbukaan-informasi-nasional-icj-makassar-mendorong-keterbukaan-informasi->

[publik_e223503b-b901-4b38-9b22-c134e66989fa](#) diakses pada Minggu, 9 Oktober 2022 Pukul 19.20 Wita.

<https://kemenag.go.id/opini/mengenal-keterbukaan-informasi-publik-1-sejarah-dan-pijakan-konstitusi-p3d6ix> diakses pada Jumat, 15 September 2023 Pukul 00.25 Wita.

<https://sulselprov.go.id/welcome/post/anugerah-keterbukaan-informasi-publik-ki-sulsel-umumkan-hasil-monev-2022> diakses pada tanggal 4 Januari 2024 Pukul 21.45 Wita.

<https://kemenag.go.id/opini/mengenal-keterbukaan-informasi-publik-1-sejarah-dan-pijakan-konstitusi-p3d6ix> diakses pada Jumat, 15 September 2023 Pukul 00.25 Wita.

<https://kbbi.web.id/informasi> diakses pada Senin, 2 Oktober 2023 Pukul 14.30 Wita.

<https://ppid-dinkes.sulselprov.go.id/info1> diakses pada Sabtu, 7 Oktober 2023 Pukul 20.23 Wita.

<https://sulselprov.go.id/welcome/post/anugerah-keterbukaan-informasi-publik-ki-sulsel-umumkan-hasil-monev-2022> diakses pada tanggal 4 Januari 2024 Pukul 21.45 Wita.

[https://komisiinformasi.go.id/read/03/08/2022/KI-Pusat-RI-Umumkan-Nilai-Indeks-Keterbukaan--Informasi-Publik-\(IKIP\)-2022-Sebesar-74,43](https://komisiinformasi.go.id/read/03/08/2022/KI-Pusat-RI-Umumkan-Nilai-Indeks-Keterbukaan--Informasi-Publik-(IKIP)-2022-Sebesar-74,43) diakses pada Jumat, 9 Februari 2024 Pukul 23.45 Wita.

<https://sulselprov.go.id/welcome/post/anugerah-keterbukaan-informasi-publik-ki-sulsel-umumkan-hasil-monev-2022> diakses pada Kamis, 4 Januari 2024 Pukul 21.45 Wita.

<https://satudata.sulselprov.go.id/organisasi> diakses pada Jumat, 16 Februari 2024 Pukul 20.45 Wita.

LAMPIRAN



KOMISI INFORMASI PROVINSI SULAWESI SELATAN

Jalan Urip Sumoharjo Nomor 269, Gedung J Lantai III Kantor Gubernur
M A K A S S A R

KEPUTUSAN

**KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : 001/SK.MONEV/KI-SS/XII/2021**

TENTANG

**HASIL MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI BADAN PUBLIK
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI SULAWESI SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Komisi Informasi berfungsi menjalankan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi;
 - b. bahwa sebagai bentuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik oleh Badan Publik diperlukan kualifikasi yang dijadikan tolak ukur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan tentang Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2021.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);
 5. Rapat Pleno Komisi Informasi Prov. Sulsel tanggal 09 Desember 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : KEPUTUSAN KETUA KOMISI INFORMASI TENTANG HASIL MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI BADAN PUBLIK PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021.
- KEDUA : Bahwa Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 berdasarkan kualifikasi per kategori Badan Publik sebagaimana disebut dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- KETIGA : Bahwa hasil keputusan ini sepenuhnya merupakan kewenangan Komisi Informasi Provinsi dan tidak dapat diganggu gugat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal , 10 Desember 2021

KOMISI INFORMASI
PROVINSI SULAWESI SELATAN,



[Handwritten Signature]
PAHIR HALIM

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI
SULAWESI SELATAN
NOMOR : 001/SK.MONEV/KI-SS/XII/2021
TENTANG HASIL MONITORING DAN EVALUASI
KETERBUKAAN INFORMASI BADAN PUBLIK
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021

**HASIL MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI
BADAN PUBLIK PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

I. BADAN PUBLIK PEMERINTAH KABUPATEN /KOTA

Nama Badan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota	Nilai	Kategori
Kabupaten Luwu Utara	95.80	Informatif
Kabupaten Sinjai	92.01	Informatif
Kota Parepare	90.55	Informatif
Kabupaten Luwu Timur	89.18	Menuju Informatif
Kabupaten Pinrang	80.36	Menuju Informatif
Kabupaten Bone	80.27	Menuju Informatif
Kabupaten Bantaeng	79.26	Cukup Informatif
Kabupaten Bulukumba	77.45	Cukup Informatif
Kabupaten Maros	71.08	Cukup Informatif
Kabupaten Pangkep	68.27	Cukup Informatif
Kabupaten Jeneponto	63.99	Cukup Informatif
Kabupaten Gowa	63.33	Cukup Informatif
Kota Palopo	63.07	Cukup Informatif
Kabupaten Luwu	62.15	Cukup Informatif
Kabupaten Wajo	61.42	Cukup Informatif

II. BADAN PUBLIK ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)

Nama Badan Publik Organisasi Perangkat Daerah	Nilai	Kategori
RSUD Labuang Baji Prov. Sulsel	85.75	Menuju Informatif
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov. Sulsel	82.84	Menuju Informatif
RSUD Haji Prov. Sulsel	80.73	Menuju Informatif
Badan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Sulsel	74.25	Cukup Informatif
Dinas Perindustrian Prov. Sulsel	71.75	Cukup Informatif
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. Sulsel	70.65	Cukup Informatif
Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	69.02	Cukup Informatif
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sulsel	67.18	Cukup Informatif
Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Prov. Sulsel	65.64	Cukup Informatif
Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sulsel	60.77	Cukup Informatif
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel	60.07	Cukup Informatif

III. BADAN PUBLIK DESA

Nama Badan Publik Pemerintah Desa	Nilai	Kategori
Desa Bana, Kabupaten Bone	94.50	Informatif
Desa Ganra, Kabupaten Soppeng	94.00	Informatif
Desa Senga Selatan, Kabupaten Luwu	92.11	Informatif
Desa Tongke-Tongke, Kabupaten Sinjai	89.57	Menuju Informatif
Desa Lainungan, Kabupaten Sidrap	89.01	Menuju Informatif
Desa Langda, Kabupaten Enrekang	86.42	Menuju Informatif
Desa Bantimurung, Kabupaten Luwu Utara	80.82	Menuju Informatif
Desa Mattiro Tasi, Kabupaten Pinrang	78.01	Cukup Informatif
Desa Pakatto, Kabupaten Gowa	77.60	Cukup Informatif
Desa Panaikang, Kabupaten Pangkep	71.45	Cukup Informatif
Lembang Rantedada, Kabupaten Tana Toraja	69.13	Cukup Informatif
Desa Cilellang, Kabupaten Barru	65.30	Cukup Informatif
Desa Bonto Tallasa, Kabupaten Maros	64.30	Cukup Informatif
Desa Panyangkalang, Kabupaten Takalar	62.91	Cukup Informatif
Desa Balantang, Kabupaten Luwu Timur	61.92	Cukup Informatif

**KOMISI INFORMASI
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KETUA**



[Handwritten Signature]
PAHIR HALIM



**KOMISI INFORMASI
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Jalan Urip Sumoharjo Nomor 269, Gedung J Lantai III Kantor Gubernur
M A K A S S A R

**KEPUTUSAN
KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : 001/SK.MONEV/KI-SS/XII/2022**

TENTANG

**HASIL MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI BADAN
PUBLIK
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI SULAWESI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengetahui pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Provinsi Sulawesi Selatan, Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan melakukan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik;
- b. bahwa Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah dilaksanakan dan dihasilkan kualifikasi yang menjadi tolok ukur pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada badan publik;
- c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan tentang Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899);

3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
5. Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 1124/V/TAHUN 2022 tanggal 20 Mei 2022 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022

Memperhatikan : Rapat Pleno Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 17 November 2022

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : KEPUTUSAN KETUA KOMISI INFORMASI TENTANG HASIL MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI BADAN PUBLIK PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022.
- KEDUA** : Bahwa Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 berupa pemeringkatan badan publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yang meliputi kualifikasi Informatif, Menuju Informatif, Cukup Informatif, Kurang Informatif, Tidak Informatif dan Tidak Dinilai yang terbagi dalam kategori Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Selatan, Organisasi Perangkat Daerah Dalam Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Desa tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Bahwa hasil keputusan ini sepenuhnya merupakan kewenangan Komisi Informasi Provinsi dan tidak dapat diganggu gugat.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal , 02 Desember 2022

KOMISI INFORMASI
PROVINSI SULAWESI SELATAN,

PAHR HALIM

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI
 SULAWESI SELATAN
 NOMOR : 001/SK.MONEV/KI-SS/XII/2022
 TENTANG HASIL MONITORING DAN EVALUASI
 KETERBUKAAN INFORMASI BADAN PUBLIK
 PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022

**HASIL MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI
 BADAN PUBLIK PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022**

I. Kategori Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

NO	OPD	NILAI	KUALIFIKASI
1	Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Prov. Sulsel	91,37	INFORMATIF
2	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov. Sulsel	90,42	INFORMATIF
3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel	80,61	MENUJU INFORMATIF
4	Dinas Perindustrian Prov. Sulsel	75,59	CUKUP INFORMATIF
5	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Sulsel	66,49	CUKUP INFORMATIF
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. Sulsel	66,08	CUKUP INFORMATIF
7	Badan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Sulsel	64,50	CUKUP INFORMATIF

II. Kategori Pemerintah Desa

NO	DESA	NILAI	KUALIFIKASI
1	Desa Bulo Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang	94,42	INFORMATIF
2	Desa Sampano Kecamatan Larompong Selatan Kabupaten Luwu	84,60	MENUJU INFORMATIF
3	Desa Ulaweng Cinnong Kecamatan Ulaweng Kabupaten Bone	83,89	MENUJU INFORMATIF
4	Desa Panaikang Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	82,93	MENUJU INFORMATIF

5	Desa Balantang Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur	82,25	MENUJU INFORMATIF
6	Desa Bontosunggu Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar	81,62	MENUJU INFORMATIF
7	Desa Topejawa Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar	81,49	MENUJU INFORMATIF
8	Desa Barania Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai	78,13	CUKUP INFORMATIF
9	Desa Bira Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba	71,49	CUKUP INFORMATIF
10	Desa Pa'benteng Kecamatan Marusu Kabupaten Maros	65,15	CUKUP INFORMATIF
11	Desa Salulemo Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara	61,54	CUKUP INFORMATIF
12	Desa Lempangang Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa	60,65	CUKUP INFORMATIF

III. Kategori Pemerintah Kabupaten/ Kota

NO	KAB/KOTA	NILAI	KUALIFIKASI
1	Pemerintah Kabupaten Luwu Timur	93,84	INFORMATIF
2	Pemerintah Kabupaten Luwu Utara	81,21	MENUJU INFORMATIF
3	Pemerintah Kota Parepare	80,15	MENUJU INFORMATIF
4	Pemerintah Kabupaten Pinrang	77,82	CUKUP INFORMATIF
5	Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang	69,48	CUKUP INFORMATIF
6	Pemerintah Kabupaten Maros	68,78	CUKUP INFORMATIF
7	Pemerintah Kabupaten Sinjai	66,90	CUKUP INFORMATIF

8	Pemerintah Kabupaten Jeneponto	63,98	CUKUP INFORMATIF
9	Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	61,06	CUKUP INFORMATIF
10	Pemerintah Kabupaten Luwu	60,06	CUKUP INFORMATIF
11	Pemerintah Kabupaten Soppeng	60,03	CUKUP INFORMATIF

**KOMISI INFORMASI
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KETUA**



KOMISI IN
PROVINSI SULAWESI